

Efektivitas Sistem Desa Milenial Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Mico Ariel Wahyu Purnomo ¹, Dini Yuliani ², Irfan Nursetiawan ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh

Corresponding Author: mico_ariel_wahyu@student.unigal.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.555>

Article Info

Article History;

Received:

2025-05-27

Revised:

2025-06-18

Accepted:

2025-06-28

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Millennial Village System in improving sustainable development in Handapherang Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency. This system is a digital-based public service innovation that is expected to encourage improvement in the quality of village governance and community participation in accessing services. However, the implementation has not been running optimally. The problems that arise include low community participation in accessing and using applications, lack of regular application system development, and incomplete village profile data input into the system. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques included interviews with eight informants, field observations, and documentation. The results of the study show that implementation obstacles come from the lack of supporting regulations, weak socialization, low digital literacy of users, and the lack of direct benefits of the system for the community. The efforts made include budget allocation for system development, the establishment of a rotating service digitization picket, and partnerships with village digital cadres to improve the competence and sustainability of the program.*

Keywords: *Millennial Villages, Information Systems, Sustainable Development*

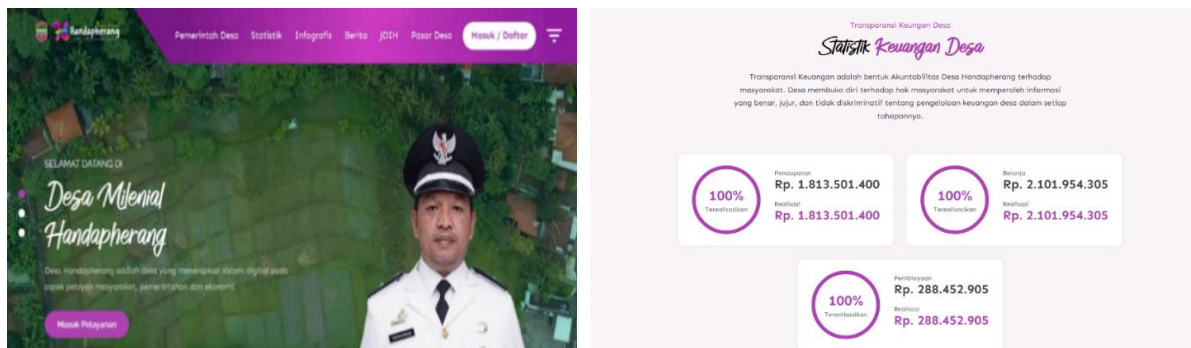
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Sistem Desa Milenial dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Sistem ini merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang muncul di antaranya rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses dan menggunakan aplikasi, minimnya pengembangan sistem aplikasi secara berkala, serta belum lengkapnya data profil desa yang terinput dalam sistem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terhadap delapan informan, observasi lapangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan hambatan implementasi berasal dari belum tersusunnya regulasi yang mendukung, lemahnya sosialisasi, rendahnya literasi digital pengguna, serta belum terlihatnya manfaat sistem secara langsung bagi masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan meliputi alokasi anggaran untuk pengembangan sistem, pembentukan piket digitalisasi layanan secara bergilir, serta kemitraan dengan kader digital desa untuk meningkatkan kompetensi dan keberlanjutan program.

Kata Kunci: *Desa Milenial, Sistem Informasi, Pembangunan Berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi aspek penting baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Percepatan dan keterbukaan akses informasi adalah tuntutan yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (1). Pemerintah Desa Handapherang menjawab tantangan ini melalui implementasi sistem Desa Milenial. Desa Milenial merupakan suatu sistem informasi manajemen pemerintahan yang berfungsi sebagai penyedia informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sistem ini telah terintegrasi oleh platform sistem informasi manajemen pemerintahan lainnya seperti sistem informasi dinas-dinas, kementerian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lain-lain. Melalui Desa Milenial, masyarakat dapat melakukan proses pelayanan dimanapun kapanpun tanpa harus datang ke kantor desa.

Pemerintah Desa Handapherang telah merencanakan dan mengembangkan Desa Milenial sejak tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19 mulai melanda di Indonesia dimana terjadi pembatasan akses interaksi dan pelayanan secara langsung. Pembuatan aplikasi Desa Milenial turut melibatkan perusahaan PT Syngare Multimedia Indonesia sebagai unsur swasta melalui pengadaan infrastruktur telekomunikasi, perancangan, pemrograman, pengembangan serta pelatihan yang pada akhirnya *Website* Desa Milenial di Desa Handapherang resmi mulai beroperasi per tanggal 18 Juli 2022, sedangkan pada aplikasi *google play store* beroperasi per tanggal 11 Januari 2024.



Gambar 1. Halaman Depan Sistem Desa Milenial di Desa Handapherang

Sumber: <https://handapherang.desa.id>, 2025

Desa milenial memiliki infrastruktur pendukung yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi secara *online* dan bertukar informasi. Infrastruktur tersebut terdiri dari Sistem Informasi Desa, *Infographic Board*, Anjungan Pelayanan Desa Mandiri (KIOSK), dan mesin absen berbasis RFID. Infrastruktur tersebut saling terintegrasi menjadi suatu kesatuan sistem informasi manajemen pemerintahan dalam suatu tata kelola pemerintah desa.

Implementasi sistem Desa Milenial mengacu pada kebijakan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana kebijakan ini mengarahkan pada penjabaran 18 tujuan

Sustainable Development Goal (SDGs) Desa yang dilakukan melalui Sistem Informasi Desa. Kebijakan tersebut juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Ciamis melalui kebijakan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Kebijakan tersebut menjelaskan peran pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti mempersingkat alur pelayanan, meminimalisir sistem birokrasi yang berbelit-belit, dan meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan anggaran di pemerintahan desa (4).

Namun dalam implementasinya, sistem Desa Milenial di Desa Handapherang masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data aplikasi Desa Handapherang-Pelayanan pada *google playstore*, Per Januari Tahun 2025, jumlah unduhan aplikasi Desa Milenial baru mencapai 10 pengguna dengan perbandingan jumlah penduduk Desa Handapherang yang berusia 17 tahun keatas pada tahun 2025 kurang lebih 4.900 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya terdapat 0,2% masyarakat desa Handapherang yang baru mengunduh aplikasi Desa Milenial untuk melakukan pelayanan secara digital. Selain itu, aplikasi Desa Milenial di Desa Handapherang belum terdapat ulasan positif dari pengguna yang menunjukkan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat desa Handapherang dalam mengunduh aplikasi Desa Milenial untuk melakukan pelayanan publik.

Di bidang infrastruktur, pengembangan aplikasi Desa Milenial masih belum adaptif terhadap perkembangan zaman. Maraknya pengguna *smartphone* dengan sistem operasi *Iphone Operating System* (IOS) oleh kalangan generasi Z dan milenial tidak diikuti dengan pengembangan aplikasi yang mendukung akses pada sistem sehingga pengguna tidak dapat mengakses aplikasi desa milenial (Desa Handapherang-Pelayanan) melalui *smartphone* berjenis *Iphone* dan hanya pengguna sistem *android* saja yang mampu mengakses aplikasi desa milenial.

Di bidang penyediaan informasi, masih terdapat informasi-informasi profil desa yang belum terdata pada Desa Milenial seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Handapherang, produk hukum desa, profil desa wisata di Desa Handapherang, sejarah Desa Handapherang dan lembaga-lembaga dalam lingkup pemerintah Desa Handapherang.

Jika Fenomena-fenomena tersebut terus dibiarkan, maka akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Handapherang. Minimnya jumlah pengguna pada aplikasi pelayanan digital akan berdampak pada minimnya interaksi dan umpan balik dari pengguna aplikasi dalam upaya pengembangan dan perbaikan kualitas aplikasi pelayanan (5) sehingga Minimnya jumlah unduhan pengguna pada aplikasi Desa Handapherang-Pelayanan akan mengakibatkan sulitnya aplikasi tersebut untuk berkembang dan melakukan upaya perbaikan.

Aksesibilitas sistem aplikasi pelayanan yang masih terbatas akan menurunkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat (6). Jika aksesibilitas aplikasi Desa Minelial di Desa Handapherang belum bisa

diakses melalui *Appstore* oleh masyarakat pengguna *smartphone* berjenis *Iphone*, maka menyebabkan turunnya tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat untuk mengunduh aplikasi Desa Milenial.

Adanya data-data profil desa yang kurang lengkap pada aplikasi pelayanan publik akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena minimnya transparansi kepada masyarakat (7). Kurangnya data profil Desa Handapherang sebagai bentuk keterbukaan informasi publik menunjukkan kurang siapnya Pemerintahan Desa Handapherang dalam mengimplementasikan sistem Desa Milenial. Tentunya fenomena tersebut menghambat keperluan masyarakat Desa Handapherang untuk mengakses data-data terkait profil desa Handapherang.

Menurut (8) agar implementasi *e-government* mampu berjalan secara efektif, pemerintah harus memiliki dan memperhatikan tiga elemen sukses implementasi *e-government*. Ketiga elemen tersebut diantaranya adalah *Support* yang memiliki unsur “*political will*”, *Capacity* yang memiliki unsur kompetensi, dan *Value* yang memiliki unsur kebermanfaatan. Jika ketiga elemen ini terpenuhi, maka akan meningkatkan probabilitas efektivitas penerapan *e-government*.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa fenomena implementasi sistem Desa Milenial di Desa Handapherang perlu untuk diteliti. Urgensi tersebut terlihat dari permasalahan yang terjadi berhubungan dengan ketiga elemen sukses dalam mengimplementasikan *e-government*. Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan fenomena-fenomena yang ada. Minimnya unduhan aplikasi Desa Milenial memiliki hubungan dengan masyarakat yang belum merasakan *value* dari adanya pelayanan digital melalui. Minimnya pembaruan sistem yang menyulitkan aksesibilitas aplikasi Desa Milenial memiliki hubungan dengan belum adanya *Capacity* yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Handapherang. Kurangnya data-data profil desa yang dipublikasikan melalui sistem Desa Milenial berhubungan dengan belum adanya *Support* yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Handapherang.

Untuk mengetahui permasalahan fenomena tersebut, penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah Desa Handapherang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahuluan terkait fenomena tersebut, ditemukan indikator-indikator permasalahan di lapangan sebagai berikut:

- 1) Minimnya partisipasi masyarakat Desa Handapherang untuk mengunduh aplikasi Desa Milenial. Kurangnya upaya sosialisasi oleh pemerintah desa Handapherang kepada masyarakat menyebabkan partisipasi masyarakat untuk mengunduh aplikasi masih tergolong kurang.
- 2) Aplikasi Desa Milenial hanya bisa diakses melalui perangkat telepon genggam dengan sistem *android*. Minimnya interaksi antara pengguna dengan penyedia aplikasi menyebabkan aplikasi tersebut sulit berkembang.
- 3) Masih terdapat informasi yang belum tersedia pada laman informasi sistem Desa Milenial. Belum adanya alokasi sumber daya secara tepat menyebabkan data dan informasi profil Desa Handapherang tidak terkelola dengan baik.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan sistem informasi digital di tingkat desa sudah banyak diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh (9) dengan kajian implementasi sistem informasi desa dalam

upaya mewujudkan *smart village* di Desa Kalisidi Kabupaten Semarang. Sistem informasi yang diteliti merupakan sistem yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Semarang untuk mempermudah pemerintah dan masyarakat Desa Kalisidi untuk memberikan pelayanan berupa informasi dan administrasi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (10) dengan kajian pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi BUMDes dan Manajemen Kelurahan/Desa (SIBERAS) di Desa Rijang Panua Kabupaten Sidenreng Rappang. Sistem informasi yang diteliti merupakan sistem yang dirancang oleh Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang untuk mempermudah pelayanan administrasi dan transparansi informasi di tingkat pemerintah desa. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (11) dengan kajian implementasi sistem informasi desa untuk meningkatkan kinerja pegawai kantor Desa Kapatihan Kecamatan Menganti. Sistem informasi yang diteliti adalah sistem informasi yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja pegawai kantor desa, dan pelayanan informasi

Namun hasil penelitian sebelumnya belum menunjukkan adanya penelitian yang membahas secara spesifik tentang efektivitas penggunaan sistem desa milenial di tingkat pemerintahan desa. Dimana penelitian sistem informasi desa masih minim yang membahas efektivitasnya untuk pelayanan administrasi, transparansi informasi, pembangunan berbasis partisipatif, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian masih minim yang membahas efektivitas sistem informasi desa yang dikembangkan dengan konsep *bottom up* yang mana pemerintah desa dan pihak swasta merancang sistem informasi sendiri untuk diimplementasikan pada penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan semua penjelasan latar belakang penelitian diatas, untuk mengetahui permasalahan implementasi sistem Desa Milenial di Desa Handapherang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Sistem Desa Milenial Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis”.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut (12) metode penelitian deskriptif merupakan metode pemecahan masalah berdasarkan keadaan subyek dan obyek penelitian seperti masyarakat, seseorang, lembaga, berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan dan fakta tersebut dikumpulkan menjadi sebuah data kemudian dianalisis.

Berikutnya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian. Menurut (13) definisi pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme* sehingga bertujuan untuk meneliti keadaan objek penelitian berdasarkan kondisi alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen kunci dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data secara induktif dan hasil penelitiannya menekankan pada makna bukan pada generalisasi.

Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah hasil wawancara kepada kepala desa, kepala seksi pelayanan, kepala dusun, BPD, dan tokoh masyarakat di Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Sedangkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian seperti jurnal, artikel, buku, peraturan-peraturan, struktur organisasi, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Sumber data adalah aspek yang memuat gambaran dalam permasalahan penelitian (14). Pada penelitian kualitatif, sumber data yang diperlukan adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data penunjang seperti dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian sehingga sumber data dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah dan menganalisa masalah penelitian. Informan, merupakan seseorang yang memiliki informasi dan data mengenai situasi dan kondisi pada lokasi penelitian (14). Pada penelitian ini, terdapat beberapa informan yang dijadikan sebagai sumber data penelitian diantaranya terlampir pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Wawancara

No	Informan	Jumlah Orang
1.	Kepala Desa Handapherang	1 Orang
2.	Sekretaris Desa Handapherang	1 Orang
3.	Kepala Seksi Pelayanan	1 Orang
4.	Kepala Dusun	1 Orang
5.	BPD Desa Handapherang	1 Orang
6.	Kader Desa Digital Handapherang	1 Orang
7.	Masyarakat Desa Handapherang	2 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Dokumen, merupakan data yang diperoleh dari dokumen seperti data-data yang membahas permasalahan tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan transkrip, buku, peraturan-peraturan, artikel, jurnal, dan lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya berikut:

- a) Studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data berdasarkan kajian dan analisis literatur kepustakaan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.
- b) Studi lapangan, merupakan metode pengumpulan data berdasarkan temuan langsung di lapangan.

Studi lapangan yang peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Observasi, adalah langkah memperoleh data melalui pengamatan langsung kondisi yang ada di lapangan dengan masalah yang sedang diteliti.
- 2) Wawancara, merupakan langkah memperoleh data melalui unsur tanya jawab berdasarkan pada permasalahan penelitian.

Pada penelitian kualitatif, peneliti menggunakan analisis data yang terdiri dari tiga alur dengan skema sebagai berikut (15):

- a) Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data yang bersumber pada catatan temuan di lokasi penelitian. Selama tahapan reduksi, peneliti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo sehingga peneliti dapat memfokuskan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak dapat ditarik dan diverifikasi.
- b) Triangulasi data, merupakan proses mengecek keabsahan data dengan teknik membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian. Triangulasi dilakukan dalam beberapa teknik diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat menyelidiki validitas karena triangulasi bersifat reflektif.
- c) Penarikan kesimpulan, merupakan proses menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil dari analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dilakukan bergantung pada catatan yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan *grand theory* menurut (8) tentang faktor-faktor keberhasilan penerapan *e-government* yang terdiri dari 3 dimensi diantaranya *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Dari ketiga dimensi tersebut menghasilkan 10 indikator penelitian sebagai unit analisis penelitian di lapangan yang dijadikan sebagai pedoman observasi dan wawancara sehingga menghasilkan beberapa jawaban seperti gambaran, hambatan, serta upaya mengatasinya dari setiap dimensi dan indikator yang dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut.

1. Dukungan

Menurut (8) dimensi dukungan atau *support* memiliki 4 indikator yang telah diteliti melalui pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi serta memaparkan bagaimana penerapannya, hambatan, dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

1) Visi dan Misi

Hasil penelitian menunjukkan disimpulkan bahwa visi dan misi Desa Handapherang dalam mendukung implementasi sistem desa milenial untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa Handapherang belum sepenuhnya berjalan optimal. Walaupun terdapat visi dan misi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui percepatan pelayanan, transparansi dan kejujuran memiliki kaitan dengan implementasi desa milenial untuk meningkatkan pelayanan di Desa Handapherang.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum adanya visi dan misi secara formal dan spesifik yang memuat arah pengembangan Desa Milenial ke dalam dokumen resmi. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait tujuan implementasi desa milenial di Desa

Handapherang sebagaimana terungkap pada hasil wawancara bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui visi dan misi Desa Handapherang. Hal tersebut sejalan berdasarkan teori menurut (16) bahwa kurangnya integrasi visi dan misi sistem informasi pemerintah yang rinci berpotensi melemahkan partisipasi berbagai *stakeholder* dan efektivitas implementasi sistem sehingga dapat dikatakan visi dan misi Desa Handapherang belum optimal dalam mendorong partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap implementasi sistem desa milenial di Desa Handapherang.

2) Pengalokasian Sumber Daya (Manusia, Finansial, Tenaga, Waktu, Informasi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian sejumlah sumber daya untuk implementasi sistem desa milenial di Desa Handapherang belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada pengalokasian sumber daya manusia, perangkat desa sudah cukup terbekali dari pendidikan dan pelatihan digitalisasi yang telah diselenggarakan baik oleh pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun alokasi sumber daya manusia terhambat pada belum tersedianya operator desa yang memiliki tugas dan fungsi untuk dalam mengelola informasi pada sistem desa milenial karena terhambat pada keterbatasan alokasi dana desa.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi peneliti bahwa banyak masyarakat desa Handapherang yang masih belum bisa menjadi user desa milenial karena minimnya pengetahuan dan informasi yang didapatkan. Fenomena tersebut membuktikan bahwa alokasi finansial yang bersumber dari dana desa masih bersifat umum dan belum mengarah pada rencana strategis untuk mendukung keberlanjutan implementasi sistem desa milenial.

Berdasarkan teori menurut (17), maka pengalokasian sumber daya sistem desa milenial masih dikatakan belum optimal. Pengaturan kelembagaan yang baik mencakup pada perencanaan strategis, penyediaan infrastruktur, pelatihan, serta kerja sama lintas sektor. Selain itu kapasitas dan kompetensi pegawai sangat menjamin kualitas dan keamanan sistem. Namun, aspek-aspek tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh di Desa Handapherang walaupun terdapat pendampingan dari duta desa digital dapat memberikan dukungan secara teknis, tetapi sifatnya hanya pada jangka waktu tertentu saja dan belum menjadi bagian dari struktur kelembagaan desa secara permanen sehingga dapat dikatakan pengalokasian sejumlah sumber daya untuk implementasi sistem desa milenial di Desa Handapherang belum berjalan optimal dalam menciptakan kualitas dan keamanan sistem. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengaturan kelembagaan dalam pengalokasian sumber daya manusia dan finansial.

3) Peraturan Pemerintah

Hasil penelitian bahwa peraturan pemerintah yang mengatur dalam implementasi sistem desa milenial di Desa Handapherang belum optimal. Walaupun terdapat beberapa peraturan pemerintah yang menjadi dasar regulasi penerapan sistem desa milenial di lingkup pemerintah desa Desa Handapherang, tetapi tidak ada regulasi yang secara spesifik menjelaskan implementasi sistem desa milenial di Desa Handapherang. Regulasi yang mengatur masih mengacu pada Peraturan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Beberapa informan wawancara menjelaskan bahwa regulasi-regulasi yang mengatur masih memiliki relevansi dengan kondisi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi peneliti yang menunjukan belum ditemukannya keberadaan Peraturan Desa Handapherang yang mengatur implementasi sistem desa milenial meskipun terdapat pengaturan dari pemerintah pusat dan daerah. Jika dikaitkan dengan pendapat (18) bahwa keberhasilan sistem informasi pemerintahan dipengaruhi oleh hukum dan peraturan yang mengatur secara kuat, jelas dan rinci sebagai pedoman pelaksanaan implementasi desa milenial di Desa Handapherang sehingga Desa Handapherang memerlukan penguatan regulasi lokal seperti penyusunan peraturan desa yang secara rinci menjelaskan implementasi sistem desa milenial agar program digitalisasi desa berjalan lebih efektif, efisien, tertib hukum, dan berkelanjutan.

4) Sosialisasi

Hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi aplikasi atau sistem desa milenial di Desa Handapherang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Handapherang melalui berbagai metode seperti kegiatan keliling Mobil Aspirasi Kampung Juara (MASKARA), pembayaran *door-to-door* sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat, demonstrasi, dan publikasi pamflet digital melalui aplikasi *whatsapp* dan website. Namun sosialisasi tersebut masih belum dikatakan optimal dan merata kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya warga desa Handapherang yang mengunduh aplikasi desa milenial untuk melakukan proses administrasi di desa. Selain itu, pemahaman masyarakat desa Handapherang akan manfaat aplikasi desa milenial masih tergolong minim.

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Handapherang hanya terpaku pada satu unsur lembaga desa saja seperti RT, RW, dan Karang Taruna. Sedangkan pelaksanaan sosialisasi dengan masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, masih terdapat komunikasi yang terputus antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, serta minimnya papan informasi yang secara publik di pasangkan seperti di jalan sekitar desa Handapherang. Jika ditinjau dari teori menurut (18) keberhasilan sosialisasi *e-government* sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kemampuan teknis dan komunikasi, metode terstruktur, dan pemanfaatan media massa sehingga diperlukan adanya perbaikan strategi sosialisasi secara terstruktur, terencana, partisipatif serta mengikuti situasi dan kondisi masyarakat lokal khususnya masyarakat desa Handapherang.

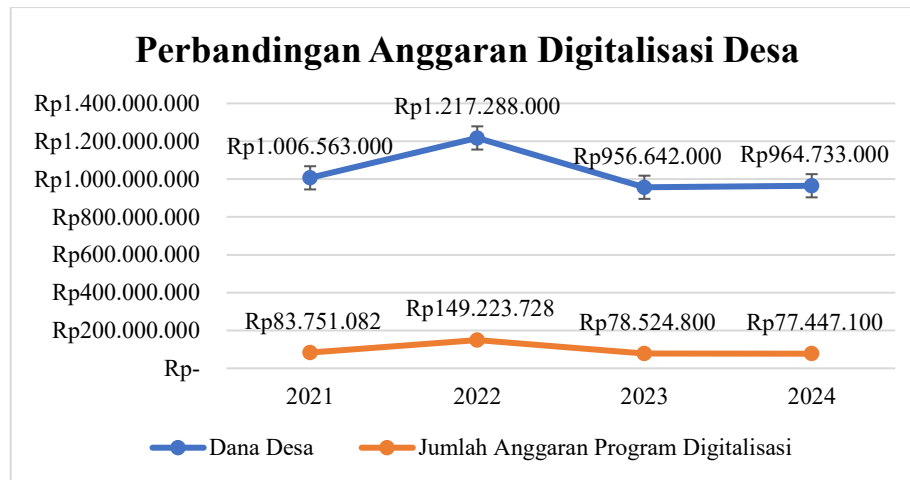
2. Kapasitas

Menurut (8) kapasitas atau *capacity* mencakup pada kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengimplementasikan *e-government*. Kemampuan yang harus dimiliki mencakup tiga aspek. Ketiga aspek tersebut digunakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai indikator penelitian yang

diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

1) Sumber Daya Finansial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem desa milenial di Desa Handapherang sudah didukung secara signifikan oleh sumber daya finansial yang berasal dari dana desa. Dalam kurun waktu empat tahun (2021-2024), alokasi penyelenggaraan program digitalisasi di Desa Handapherang rata-rata mengalokasikan anggaran yang berasal dari dana desa sebesar 10% pada setiap tahunnya.



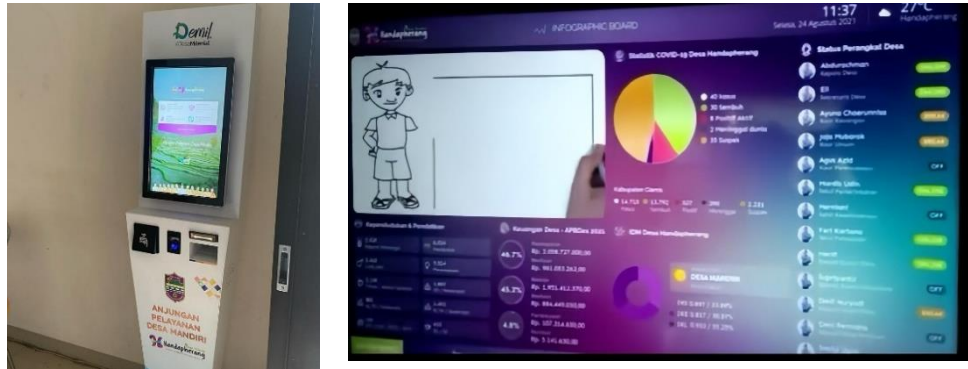
Gambar 2. Perbandingan Anggaran Digitalisasi Desa di Desa Handapherang (2021-2024)

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Handapherang, 2025

Kisaran anggaran tersebut sebesar Rp70.000.000,00-Rp150.000.000 yang digunakan untuk keperluan operasional program digitalisasi. Selain dana desa, pemerintah desa Handapherang juga memperoleh bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baik berupa finansial maupun perangkat keras. Hal tersebut sejalan dengan teori (18) yang menjelaskan bahwa finansial merupakan aspek penting dalam keberhasilan penerapan *e-government* secara berkelanjutan yang terdiri dari pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem sehingga keberlanjutan implementasi sistem desa milenial di Desa Handapherang diperlukan suatu tata kelola keuangan yang adaptif dan kolaboratif.

2) Infrastruktur Teknologi Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi komunikasi sistem desa milenial di Desa Handapherang sudah tersedia secara memadai dibuktikan dengan tersedianya perangkat keras yang mendukung penyelenggaraan pelayanan digital dan jaringan internet di wilayah desa Handapherang yang sudah sangat memadai. Infrastruktur tersebut telah terintegrasi dengan sistem informasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Infrastruktur desa milenial juga telah mendapatkan lisensi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.



Gambar 3. Mesin Anjungan Pelayanan (KIOSK), dan Infographic Board
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Namun terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pengoptimalisasian pengoperasian infrastruktur desa milenial di Desa Handapherang seperti keterbatasan dukungan pada sistem operasi aplikasi untuk perangkat *Iphone Operating System* (IOS), pemanfaatan infrastruktur yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, minimnya literasi digital masyarakat, dan belum adanya prosedur pelayanan yang jelas. Menurut (18) salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan proyek *e-government* adalah infrastruktur telekomunikasi yang mendukung. Tersedianya perangkat keras seperti komputer dan jaringan harus dipenuhi sebagai penunjang keberhasilan penerapan *e-government* di suatu daerah sehingga diperlukan upaya pengembangan infrastruktur desa milenial secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu diperlukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat desa Handapherang.

3) Kompetensi Pengguna

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengguna desa milenial di Desa Handapherang masih pada tahap persiapan dan sepenuhnya belum optimal. Faktor internal dan eksternal menyebabkan kondisi ini terjadi. Dari sisi perangkat desa, implementasi sistem desa milenial sudah diarahkan pada persyaratan penjangkaran calon perangkat desa harus memiliki kompetensi dalam mengoperasikan teknologi. Namun kenyataannya masih banyak perangkat desa khususnya yang sudah lanjut usia kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi. Upaya telah dilakukan melalui kebijakan piket bergilir di ruang pelayanan berdasarkan keputusan kepala desa Handapherang sekaligus menjadikannya sebagai pelatihan secara internal bagi perangkat yang belum menguasai perangkat teknologi informasi.

Sementara itu, dari sisi masyarakat menunjukkan masih belum optimalnya kompetensi dalam mengoperasikan sistem desa milenial untuk melakukan pelayanan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem desa milenial di Desa Handapherang. Selain itu, minimnya inisiatif perangkat desa dalam membimbing masyarakat menjadi terhambatnya kompetensi masyarakat.

Penempatan kader desa digital merupakan upaya yang bertujuan sebagai jembatan antara masyarakat dan teknologi dalam pemanfaatan layanan digital seperti pelayanan administrasi, ekonomi digital, dan pembangunan. Walaupun upaya tersebut telah dilakukan, penguasaan sistem desa milenial

secara menyeluruh masih menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah desa Handapherang sehingga kondisi ini menghambat proses sosialisasi secara mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan teori menurut (17) serta (18) keberhasilan implementasi sistem informasi ditentukan oleh kompetensi dari para pengguna dan sinergitas antar stakeholder sehingga untuk meningkatkan keberhasilan program digitalisasi diperlukan kolaborasi, pelatihan intensif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta komitmen dari kepada desa untuk membangun budaya literasi digital yang inklusif dan adaptif.

3. Manfaat

Menurut (8) manfaat atau *value* yang dirasakan oleh masyarakat terdiri dari kemudahan memperoleh informasi (*publish*), memperluas partisipasi masyarakat (*interact*), dan meningkatnya akuntabilitas (*transact*) sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Transparansi (*Publish*)

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem desa milenial dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan desa secara digital. Beberapa informasi dapat diakses pada lama desa milenial seperti data dan statistik kependudukan, visi misi pemerintah desa, struktur organisasi lembaga desa, demografi penduduk, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, Laporan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), Indeks Desa Membangun (IDM), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) desa, pasar desa, desa wisata, dan informasi-informasi terbaru seputar berita di Desa Handapherang.

Namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh dua sisi. Dari sisi pemerintah desa, masih minimnya konsistensi dalam melakukan input dan pembaruan data. Selain itu banyak data profil desa yang belum terpublikasi secara menyeluruh. Pada sisi masyarakat, masih banyak warga yang memiliki literasi digital dengan kategori rendah dan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa Handapherang terhadap pemanfaatan sistem desa milenial sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengetahui cara menggunakan sistem desa milenial serta manfaat yang akan dirasakan.



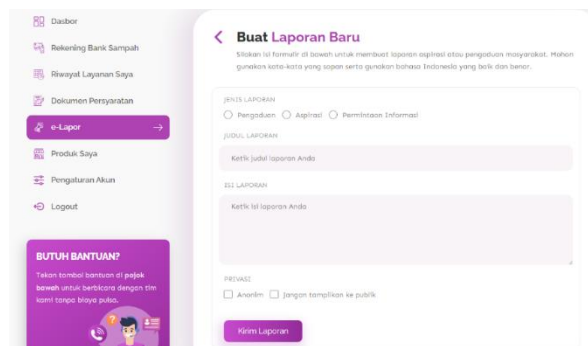
Gambar 4. Contoh Informasi yang Belum Terdata

Sumber: <https://handapherang.desa.id>, 2025

Jika dikaitkan dengan pendapat (8) sistem desa milenial pada dasarnya dapat memberikan manfaat pada kategori publish. Namun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat masih bersifat pasif. Hal tersebut tergantung pada seberapa seringnya informasi pada sistem tersebut diakses dan dimanfaatkan. Jika publikasi pada sistem tidak dilakukan secara konsisten, maka potensi pada sistem desa milenial belum bisa dirasakan oleh masyarakat.

2) Partisipasi (*interact*)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem desa milenial sudah dirancang untuk meningkatkan nilai partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa khususnya dalam memberikan laporan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan data. Fitur pendukung yang digunakan untuk interaksi secara digital adalah e-lapor yang secara teknis sudah siap digunakan.



Gambar 5. Fitur e-lapor pada Sistem Desa Milenial

Sumber: <https://handapherang.desa.id>, 2025

Namun fitur tersebut belum dimanfaatkan secara masif oleh masyarakat. Kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya literasi digital, minimnya kegiatan sosialisasi, budaya pelayanan tatap muka yang masih melekat, dan situasi yang sedang di masa transisi teknologi. Kader Desa Digital membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kunjungan masyarakat dalam mengakses sistem desa milenial, namun belum cukup dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan fitur e-lapor.

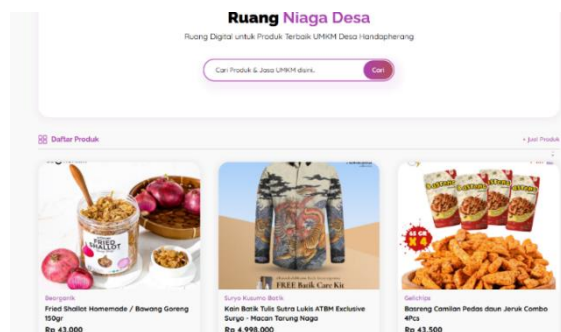
Kondisi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (8). Pada tahap interact yaitu kondisi pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi satu arah saja. Tetapi terdapat fitur yang menyediakan komunikasi dua arah dengan pemerintah seperti mengajukan laporan pengaduan, aspirasi, dan permintaan data. Selain itu terdapat fitur *chatbot* yang memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah di luar jam kerja melalui bantuan *Artificial Intelligence* (AI). Meskipun faktanya pelaksanaan belum berjalan secara optimal karena minimnya partisipasi dari pihak masyarakat.

3) Akuntabilitas (*Transact*)

Hasil wawancara menunjukan sistem desa milenial di Desa Handapherang secara umum dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa melalui berbagai fitur yang disediakan pada sistem diantaranya pelaporan yang transparan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

kehadiran perangkat desa, data pembayaran Pajak Bumi dan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan dokumentasi kegiatan desa. Hal tersebut dipengaruhi oleh keberadaan perangkat-perangkat yang menunjang.

Selain itu, sistem ini memfasilitasi transaksi secara digital. Hal ini sesuai dengan teori (8) yang menjelaskan bahwa tahap transact mencakup interaksi dua arah yang melakukan proses transaksi seperti pembayaran Pajak Bumi dan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengelolaan bank sampah digital, dan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Ruang Niaga Desa. Fitur-fitur tersebut bertujuan untuk meningkatkan peluang masyarakat untuk melakukan aktivitas perdagangan secara online dengan perlindungan sistem yang sudah teruji dan memiliki lisensi dari inspektorat.



Gambar 6. Ruang Niaga Desa Handapherang
Sumber: <https://handapherang.desa.id>, 2025

Namun dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah, sistem desa milenial belum menunjukkan langkah maksimal. Beberapa informan dari kalangan masyarakat belum mengetahui keberadaan merasakan manfaat dari adanya sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah desa Handapherang sehingga akuntabilitas pemerintah desa Handapherang hingga saat ini masih diragukan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem desa milenial untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan oleh temuan-temuan penelitian seperti belum adanya peraturan desa, visi, dan misi yang menjelaskan secara spesifik implementasi sistem desa milenial di Desa Handapherang. Selain itu, pengembangan sistem belum sesuai dengan kebutuhan pengguna, sebagian perangkat desa belum menguasai, alokasi anggaran belum membuahkan hasil maksimal, informasi belum terpublikasi secara menyeluruh, dan minimnya informasi serta pengetahuan masyarakat tentang keberadaan sistem desa milenial di Desa Handapherang.

Hambatan yang ditemukan penelitian ini antara lain minimnya *political will*, kesadaran perangkat desa dalam input data, kompetensi perangkat desa, sosialisasi kepada masyarakat, literasi digital

masyarakat, masukan dari pengguna aplikasi, partisipasi masyarakat dalam mengunduh aplikasi, serta kondisi desa handapherang yang sedang pada masa transisi dari pelayanan konvensional menuju pelayanan secara digital.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain menyusun regulasi, melaksanakan piket bergilir sehari sebanyak 2 perangkat desa di ruang pelayanan, bermitra dengan kader desa digital, rutin menginformasikan kepada kepala dusun, merekrut influencer media sosial, mengalokasikan anggaran sebanyak 10% untuk mengembangkan sistem, dan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prasetyawati AE. Pengembangan Sistem dan Pelayanan Kearsipan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*. 2023;7(1):49–57.
2. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Ali K, Saputra A. Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*. 2020;9(1):602–14.
5. Subiyanto RF, Guffari MA, Saputra AA, Nurdin N. Mengkaji Dampak Implementasi Aplikasi JAKI Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik di Kota Jakarta. *Indonesian Journal of Social Development*. 2024;1(4).
6. Putri RI, Zulkarnaini Z. Inovasi Pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir. *JURNAL Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. 2022;1(4):88–96.
7. Ristiandy Risky. Disintegrasi Data Kependudukan Antar Opd Layanan Publik Kabupaten Belitung Timur Di Tengah Arus Revolusi Industri 4.0. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2021;87–96.
8. Indrajit REko. *Electronic Government In Action; modul pembelajaran berbasis standar kompetensi dan kualifikasi kerja edisi 2*. Yogyakarta: Preinexus.; 2016.
9. Rahman NF, Manar DG. Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Upaya Mewujudkan Smart Village (Desa Kalisidi Kabupaten Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*. 2023;13(1):15–30.
10. Ahmad Z. Pengembangan Dan Penerapan Sistem Informasi Dan Manajemen Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siberas Di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 2025;11(1):185–205.
11. Octavia II, Suprobawati D. Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Desa Kepatihan Kecamatan Menganti . *Jurnal Inovasi Sektor Publik*. 2023;3(3):75–86.
12. Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2010.
13. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2016.
14. Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2006.
15. Miles BM, Huberman M. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP; 1992.
16. Heeks R. *Understanding E-Governance for Development*. [Manchester]: Institute for Development Policy and Management; 2001.
17. Indrayani E, Gatningsih. *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan*. Bandung: IPDN Prees; 2013.
18. Indrajit RE. *Electronic Government :Strategi Implementasi di Berbagai Negara*. Academia Education; 2007.